

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan analisis hasil pengumpulan data penelitian dari 34 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh Provinsi di Indonesia periode tahun 2011-2015. Pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling, yang merupakan pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Berdasarkan metode tersebut maka hasil sampel yang telah diseleksi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Total Pemerintah Daerah Provinsi yang ada di Indonesia periode 2011-2015	168
Pemerintah Daerah yang memiliki nilai negatif	(5)
Pemerintah Daerah yang tidak memiliki data DAK	(7)
Data terkena outlier	(51)
Data Tersedia Lengkap	104
Total sampel selama lima tahun penelitian yang memenuhi kriteria <i>purposive sampling</i>	104

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa selama periode 2011-2015 jumlah pemerintah daerah yang terkena *outlier* yaitu sejumlah 51. Pada akhirnya

pemerintah daerah yang memenuhi kriteria *purposive sampling* sebanyak 104 sampel.

B. Uji Kualitas Data

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap proporsi belanja modal di pemerintah.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBM	104	0,053	0,260	0,15946	0,051522
PAD	104	140.39 6.939	16.032.85 6.414	2.861.091.142	3.748.079.318,447
DAU	104	51.44 6.845	2.277.93 2.698	993.468.970	390.893.647,932
DAK	104	1.037.925	460.303.520	64.624.441,22	58.127.469,697
IPM	104	56,75	77,59	70,5426	4,11804
PDRB	104	0,002	0,156	0,06123	0,019699

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari jumlah sampel (N) sejumlah 104. Pada variabel proporsi belanja modal memiliki nilai minimum data ialah sebesar 0,053 (5%) yang dimiliki oleh provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012. Nilai maksimum data pada variabel proporsi belanja modal ialah sebesar 0,260 (26%) yang dimiliki oleh provinsi Riau pada tahun 2015. Nilai rata-rata data pada variabel proporsi belanja modal ialah sebesar 0,15946 (15,95%) dengan standar deviasi ialah sebesar 0,051522.

Dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari jumlah sampel (N) sejumlah 104. Pada variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum data ialah sebesar 140.396.939 yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012. Nilai maksimum data pada variabel pendapatan asli daerah ialah sebesar 16.032.856.414 yang dimiliki oleh provinsi Jawa Barat pada tahun 2015. Nilai rata-rata data pada variabel pendapatan asli daerah ialah sebesar 2.861.091.142,92 dengan standar deviasi ialah sebesar 3.748.079.318,447.

Dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari jumlah sampel (N) sejumlah 104. Pada variabel dana alokasi umum memiliki nilai minimum data ialah sebesar 51.446.845 yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011. Nilai maksimum data pada variabel dana alokasi umum ialah sebesar 2.277.932.698 yang dimiliki oleh provinsi Papua pada tahun 2015. Nilai rata-rata data pada variabel dana alokasi umum ialah sebesar 993.468.970 dengan standar deviasi ialah sebesar 390.893.647,932.

Dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari jumlah sampel (N) sejumlah 104. Pada variabel dana alokasi khusus memiliki nilai minimum data ialah sebesar 1.037.925 yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014. Nilai maksimum data pada variabel dana alokasi khusus ialah sebesar 460.303.520 yang dimiliki oleh provinsi Papua pada tahun 2015. Nilai rata-rata data pada variabel dana alokasi

khusus ialah sebesar 64.624.441,22 dengan standar deviasi ialah sebesar 58.127.469,697.

Dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari jumlah sampel (N) sejumlah 104. Pada variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai minimum data ialah sebesar 56,75 yang dimiliki oleh provinsi Papua pada tahun 2014. Nilai maksimum data pada variabel indeks pembangunan manusia ialah sebesar 77,59 yang dimiliki oleh provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2015. Nilai rata-rata data pada variabel indeks pembangunan manusia ialah sebesar 70,5426 dengan standar deviasi ialah sebesar 4,11804.

Dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari jumlah sampel (N) sejumlah 104. Pada variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum data ialah sebesar 0,002 yang dimiliki oleh provinsi Riau pada tahun 2015. Nilai maksimum data pada variabel pertumbuhan ekonomi ialah sebesar 0,156 yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015. Nilai rata-rata data pada variabel pertumbuhan ekonomi ialah sebesar 0,06123 dengan standar deviasi ialah sebesar 0,019699.

2. Uji Asumsi Klasik

Tahapan pengujian regresi berganda yaitu menggunakan beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi : uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas yang secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal, dalam penelitian ini uji normalitas dapat di uji menggunakan kolmogorov smirnov terhadap masing-masing variabel, Berikut ini adalah hasil uji normalitas data dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*:

Tabel 4.3
Uji Statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03190452
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,057
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Test distribution is Normal.

Hasil uji *K-S* pada tabel 4.3 di atas terlihat besarnya test statistic adalah 0,069 dan nilai *K-S* adalah 0,200 dan nilai signifikansi diatas 5% ($\alpha = 0,05$). Dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal atau memenuhi asumsi klasik.

b. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Uji autokorelasi yaitu untuk

mengetahui korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai d statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW test. Berikut ini adalah hasil Uji Autokorelasi dengan uji statistik Durbin Watson :

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,785 ^a	,617	,597	,032708	1,788

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, IPM, PDRB

b. Dependent Variable: PBM

Hasil uji Autokorelasi pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,788, dengan jumlah data sampel 104, jumlah variabel bebas 4 nilai $d_l = 1,1927$ dan $d_u = 1,7298$ yang berada diantara $d_U < d_W < 4 - d_U$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan data dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Deteksi multikolinieritas

pada suatu model dapat dilihat dimana jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil Uji Multikolinieritas :

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	0,602	1,662
DAU	0,405	2,472
DAK	0,537	1,863
IPM	0,622	1,607
PDRB	0,916	1,091

Dependent Variable : PBM

Hasil Uji Multikolinieritas pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, IPM dan PDRB mempunyai angka *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah angka 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 10% ($\alpha = 0,10$). Hal ini berarti data dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas dalam variabel yang diteliti.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah berjenis homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan adalah Uji *Glejser*.

Tabel 4.6
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,035	,041		,843	,401
PAD	-8,754	,000	-,180	-1,415	,160
DAU	-6,747	,000	-,014	-,093	,926
DAK	-1,113	,000	-,004	-,026	,979
IPM	2,476	,001	,006	,045	,964
PDRB	-,121	,095	-,131	-1,268	,208

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Data dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas apabila memiliki nilai sig > 0,05. Hasil uji Glejser pada Tabel 4.6 di atas ini menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen memiliki nilai sig > 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini meliputi hasil uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikan parameter individual (uji statistic t), uji signifikansi simultan (uji statistic F) dan analisis regresi berganda.

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya regresi linier berganda. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,785 ^a	,617	,597	,032708

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, IPM, PDRB

b. Dependent Variable: PBM

Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,597. Hal ini berarti 59,7% variabel proporsi belanja modal dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, IPM, PDRB sedangkan 40,3% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

2. Hasil Uji Nilai Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Statistik F dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,169	5	,034	31,513	,000 ^b
	Residual	,105	98	,001		
	Total	,273	103			

a. Dependent Variable: PBM

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, IPM, PDRB

Hasil Uji statistik F pada tabel 4.5 diatas untuk menguji pengaruh PAD, DAU, DAK, IPM dan PDRB yang mempunyai F-hitung sebesar 31.513 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dikatakan dapat menjelaskan variabel dependen secara signifikan.

3. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial. Signifikansi model regresi pada penelitian ini dapat diketahui dengan melihat nilai sig. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,576	,074		7,747	,000		
PAD	-5,478	,000	-,398	-4,942	,000	,602	1,662
DAU	-6,288	,000	-,477	-4,851	,000	,405	2,472
DAK	2,044	,000	,231	2,701	,008	,537	1,863
IPM	-,004	,001	-,343	-4,331	,000	,622	1,607
PDRB	-,789	,171	-,302	-4,619	,000	,916	1,091

a. Dependent Variable: Proporsi_Belanja_Modal

1. Hasil Uji t untuk H_1 diperoleh hasil koefisien B sebesar -5,478 (negative) dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa **H₁ ditolak** karena hasil uji t menunjukkan arah negative dan signifikan sehingga tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal.

2. Hasil Uji t untuk H₂ diperoleh hasil koefisien B sebesar -6,288 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) yang artinya dana alokasi umum berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **H₂ ditolak** karena hasil uji t menunjukkan arah negative dan signifikan sehingga tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal.
3. Hasil Uji t untuk H₃ diperoleh hasil koefisien B sebesar 2,044 dengan signifikansi sebesar 0,008. Nilai signifikan untuk variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) yang artinya dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **H₃ diterima** karena hasil uji t menunjukkan arah positif dan signifikan sehingga sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal.

4. Hasil Uji t untuk H_4 diperoleh hasil koefisien B sebesar -0,004 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) yang artinya indeks pembangunan manusia berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **H_4 ditolak** karena hasil uji t menunjukkan arah negative dan signifikan sehingga tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal.
5. Hasil Uji t untuk H_5 diperoleh hasil koefisien B sebesar -0,789 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) yang artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **H_5 ditolak** karena hasil uji t menunjukkan arah negative dan signifikan sehingga tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal.

4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil analisis data pada tabel 4.9 diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut :

$$PBM = 0,576 - 5,478PAD - 6,288DAU + 2,044DAK - 0,004 IPM - 0,789PDRB + e$$

Berdasarkan persamaan hasil regresi linier berganda tersebut, nilai konstan untuk persamaan regresi menunjukkan sebesar 0,576. Artinya, ketika pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dianggap konstan, maka jumlah belanja modal akan naik sebesar 576 kasus.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Proporsi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal, hal ini dapat dikarenakan ada nilai PAD yang rentangnya sangat jauh, yaitu antara Provinsi Sulawesi barat dan Jawa Barat, terbukti dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata PAD berjumlah Rp 2,8 Trilyun, dengan rincian nilai terendah Rp 140 Milyar terdapat di provinsi Sulawesi Barat dan nilai tertinggi Rp 16 Trilyun terdapat di provinsi Jawa Barat. Daerah dengan PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yovita (2011) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD berpengaruh negative signifikan terhadap belanja modal. Yovita (2011) mengatakan bahwa provinsi dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja

modal yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap proporsi belanja modal, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardhani dan Sianipar, 2011) yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam kenaikan tingkat belanja modal. Besarnya nilai yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat menjadi insentif untuk meningkatkan belanja modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Proporsi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proporsi belanja modal namun dengan arah negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Hubungan penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan dengan teori *stewardship* sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah negative (Yovita, 2011). Hal ini disebabkan DAU lebih

banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian ini dimana DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proporsi belanja modal namun dengan arah negatif. Abdullah dan Halim (2004) memiliki perbedaan penelitian yang menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang, transfer berpengaruh terhadap anggaran belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran anggaran belanja modal. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan jika semakin rendah DAU maka proporsi belanja modal semakin meningkat begitu juga sebaliknya semakin meningkat DAU maka alokasi belanja modal semakin rendah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Proporsi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proporsi belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki proporsi belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa proporsi belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah

dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi proporsi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka proporsi belanja modal pun meningkat.

Nurhidayati dan Yaya (2013) menunjukkan hasil DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan public. Sianipar (2011) memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berkaitan dengan itu, penelitian Nuarisa (2013) dan Wandira (2013) juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa pengaruh DAK terhadap belanja modal adalah positif dan signifikan. Dari Hasil

penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh signifikan terhadap proporsi belanja modal. Ardhani (2011) memiliki perbedaan penelitian yaitu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Proporsi Belanja Modal

Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Andaiyani (2012) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Belanja Modal, ini berarti bahwa semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dari indikator umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak maka pemerintah akan cenderung mengurangi proporsi belanja modalnya dikarenakan asumsi pemerintah daerah dengan IPM yang tinggi maka pemerintah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi sehingga dapat mengurangi proporsi belanja modal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi berarti daerah tersebut sebenarnya telah tergolong daerah yang sudah maju. Daerah maju dengan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang baik memicu peningkatan pendapatan daerah. Dengan bertambahnya pendapatan pada daerah

tersebut, pemerintah dapat menganggarkan proporsi belanja modalnya lebih banyak. Kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah harus dilaksanakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan daerah. Aditya (2015) memiliki perbedaan penelitian dengan hasil penelitian berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Proporsi Belanja Modal

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal. Sularso dan Restianto (2011) memiliki penelitian yang sejalan dengan menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan alasan dalam praktik penyusunan anggaran usulan yang diajukan oleh eksekutif cenderung mengutamakan kepentingan eksekutif, dimana eksekutif mengajukan anggaran baik segi financial maupun non financial untuk memenuhi *self interestnya*. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh (Darwanto, 2007) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan data anggaran belanja modal mengalami penurunan, tetapi sebaliknya pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Upaya

meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Oates (1993) memiliki perbedaan penelitian yang berpengaruh signifikan dimana oates menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berimbas pada penciptaan sector public di daerah. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Adi (2007) secara spesifik menyebutkan ada tiga factor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.